

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-----------------|---------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Metro Jateng | Republika | Kompas | Solopos |

Wilayah Berita : BPK

Halaman 5 dan 9

Penggunaan Sisa Dana Haji Tunggu Audit BPK

● IIT SEPTYANINGSIH, FUJI EKA PERMANA

JAKARTA — Sisa dana operasional haji tidak bisa serta-merta digunakan untuk menutup kekurangan ongkos haji musim haji tahun ini. Sebab, proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan saat ini masih berjalan. "Dananya sudah, tapi saya masih menunggu hasil audit BPK," ujar anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu kepada *Republika*, kemarin.

Menurut dia, apabila audit sudah

selesai, dana itu dapat digunakan. Audit BPK meliputi perincian penggunaan dana haji, termasuk informasi dana sisa operasional haji tahun-tahun sebelumnya. Ia mengaku belum mengetahui kapan pemeriksaan akan tuntas. "Kalau BPK menyatakan bahwa dia adalah nilai manfaat, maka penggunaannya harus izin DPR," kata Anggito.

Saat dikonfirmasi ke BPK, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, saat ini belum menda-



Transparansi Dana Haji Ditagih

Hlm- 9

pat informasi mengenai hasil audit tersebut. "Jadi, harus dikonfirmasi dulu ke unit kerja yang memeriksanya. BPK kan *meriksa* 1.600 laporan per tahun," ujarnya kepada *Republika* di Jakarta, Kamis, (15/3).

Lebih lanjut, Yudi menyatakan, pada awal April nanti, BPK akan menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK pada semester II tahun lalu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden. Rencananya, BPK bakal menyerahkan sekitar 500

laporan hasil tersebut. "Jadi, kita tunggu saja. Kemungkinan di dalamnya ada salah satu yang terkait (sisa dana haji empat tahun terakhir)," kata Yudi.

Perlu diketahui, pemerintah dan DPR menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini sebesar Rp 35.235.602 per jamaah haji. DPR dan pemerintah pun menetapkan dana optimalisasi mencapai lebih dari Rp 6,3 triliun, maka setiap orang dari total 221 ribu jamaah haji akan mendapatkan sekitar Rp 28 juta.

Bersambung ke hlm 9 kol 1-3

Sementara itu, BPKH menargetkan nilai manfaat pada 2018 sebanyak Rp 6,1 triliun. Hanya saja, sebanyak Rp 1 triliun dibagikan secara merata kepada 3,5 juta calon jamaah yang masuk ke dalam daftar tunggu. Hal itu berarti hanya Rp 5 triliun dana optimalisasi yang tersedia sehingga ada selisih Rp 1,3 triliun dengan dana optimalisasi yang ditetapkan pemerintah serta DPR.

Namun, Ketua Panitia Kerja BPIH dari Komisi VIII DPR Noor Achmad menuturkan, selisih itu dapat ditutupi dari sisa operasional haji tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali menjelaskan dana yang dimaksud.

Ia mengatakan, sisa dana optimalisasi tahun sebelumnya yang dimaksud Komisi VIII DPR semua sudah di BPKH, tidak ada di Kemenag. Sedangkan, efisiensi dana penyelenggaraan haji masuk ke dana abadi umat (DAU). "Perlu saya klarifikasi, BPKH bukan hanya sanggup Rp 5 triliun, tapi memang hasil optimalisasi yang ditargetkan

BPKH adalah Rp 5 triliun untuk tahun 2018," ujar Nizar melalui pesan singkat kepada *Republika*, Kamis (15/3).

Ia melanjutkan, tahun sebelumnya masih ada dana sekitar Rp 3,1 triliun. Dengan demikian, nilai akumulatifnya menjadi Rp 8,1 triliun. "Jika dipakai Rp 6,3 triliun untuk *indirect cost* (dana optimalisasi) 2018, maka masih ada sisa," kata Nizar.

Jelaskan ke publik

Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berpandangan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memiliki kewajiban menjelaskan tentang dana optimalisasi dan penggunaannya kepada publik. Hal ini agar semua menjadi transparan. "Tahu tidak masyarakat itu, uangnya yang belum berangkat (calon jamaah haji yang belum berangkat) digunakan oleh yang sekarang berangkat," ujar Komisioner KPHI Syamsul Maarif kepada *Republika* di Jakarta, Senin (15/3).

Ia menegaskan, semua calon jamaah haji berhak mengetahui dana optimalisasi dan penggunaannya. Sebab, dana optimalisasi tersebut milik mereka. KPHI juga menilai, masyarakat,

dalam hal ini semua calon jamaah haji, masih banyak yang belum tahu tentang dana optimalisasi dan penggunaannya. "Maka, tidak dibenarkan menggunakan uang optimalisasi itu dihabiskan, karena itu masih ada hak orang lain, itu yang selalu saya ingatkan," ujarnya.

Syamsul menyampaikan, nanti tiba-tiba ada perubahan BPIH, maka yang berangkat belakangan menjadi korban. KPHI juga sudah menyarankan supaya BPIH lebih realistis. "Makanya, saya sudah pernah *manggil* Anggito (kepala BPKH) dan teman-teman, ya harus realistis," katanya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, sisa dana optimalisasi dana haji per Desember 2017 sebesar Rp 3,04 triliun. Sisa dana optimalisasi tersebut didapat dari hasil pengembangan (nilai manfaat) penempatannya di deposito dan sukuk pada sejumlah bank penerima setoran. "Adapun hasil efisiensi dari pelaksanaan penyelenggaraan haji dimasukkan ke dana abadi umat," ujarnya melalui pesan singkat kepada *Republika*, kemarin.

■ ed: muhammad iqbal